

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Permasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan perkotaan yang upaya penanganannya dari waktu ke waktu berbanding lurus dengan terus berkembang dan munculnya kawasan permukiman kumuh baru apabila tidak ditangani dengan insentif, menyeluruh dan tepat sasaran. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni antara lain karena berada pada wilayah yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam luasan yang terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas bangunan rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan penghuninya.

Salah satu permasalahan permukiman kumuh ditandai dengan meningkatkan kondisi rumah layak huni. Di Indonesia data Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan bahwa sekitar 9,12% rumah tangga dari 64,1 juta rumah tangga tinggal didalam kondisi rumah yang tidak layak huni dan terdapat 35,291 ha kawasan permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Di prediksi 68% orang indonesia akan tinggal di Kota pada tahun 2025 sehingga kawasan kumuh terus meningkat.

Dalam menangani fenomena perumahan dan pemukiman kumuh dibutuhkan keterlibatan pemerintah dengan cara menciptakan program-program atau kegiatan secara terpadu antara pertumbuhan dan pemerataan, diantaranya upaya-upaya untuk peningkatan peran pemerintah yang lebih bisa menggerakkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional merupakan syarat utama yang akan melandasi keberhasilan dalam pembangunan di Indonesia (Teraik, 2015).

Dalam memberdayakan masyarakat dalam Islam lebih tepatnya menggunakan bentuk dakwah *bi al-hal* yang mana lebih menekankan pada aspek pelaksanaan suatu program. Ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat berkaitan erat menyangkut dengan perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan. Prinsip pembangunan masyarakat dalam Islam adalah holistik dan mempedulikan semua aspek kehidupan dan penghidupan, eksistensi komponen alam termasuk juga lingkungan bukan hanya manusia. Pemberdayaan dimaksudkan sebagai upaya merubah masyarakat tradisional, masyarakat miskin, terbelakang dan tidak beriman menuju masyarakat yang modern yang maju kreatif beriman dan bertakwa (Kamaluddin, 2014). Namun pada kenyataannya yang ada di lapangan kebersihan lingkungan ini masih menjadi masalah besar karena sebagian masyarakat masih ada yang berperilaku tidak ramah lingkungan.

Penanganan permukiman kumuh membutuhkan kolaborasi banyak sektor oleh banyak pihak untuk dapat mengerahkan sumber daya dan dana

dari tingkat pusat, provinsi, kota atau kabupaten, kelurahan atau desa, termasuk pihak swasta, perguruan tinggi dan kelompok-kelompok lainnya melalui keterpaduan program. Pemerintah kabupaten atau kota diharapkan dapat melakukan kolaborasi tersebut dalam peningkatan kualitas permukiman di wilayahnya untuk mewujudkan 0% permukiman kumuh.

Partisipasi dalam pembangunan tidak hanya dipandang sebagian dari proses tetapi merupakan bagian dari tujuan. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan khususnya dalam program pembangunan desa. Keuntungan lain dalam ikut berpartisipasi dalam perubahan adalah meningkatkan kemampuan dalam pengertian meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mereka mampu berinisiatif sendiri dan mempengaruhi proses dan hasil pembangunan, Meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga mereka mampu mengambil tanggung jawab dalam dalam pengelolaan proyek pembangunan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek. Penanganan permukiman kumuh membutuhkan kolaborasi banyak sektor oleh banyak pihak untuk dapat mengerahkan sumber daya dan dana dari tingkat pusat, provinsi, kota atau kabupaten, kelurahan atau desa, termasuk pihak swasta, perguruan tinggi dan kelompok-kelompok lainnya melalui keterpaduan program. Pemerintah kabupaten atau kota diharapkan dapat melakukan kolaborasi tersebut dalam peningkatan kualitas permukiman di wilayahnya untuk mewujudkan 0% permukiman kumuh.

Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 Mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan pemukiman yaitu peningkatan kualitas pemukiman kumuh, Pencegahan tumbuh kembangnya pemukiman kumuh baru dan penghidupan yang berkelanjutan atau sustainable. Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam laporan kerjanya tahun 2015 berinisiatif dan meresmikan pembangunan platform kolaborasi melalui program kota tanpa kumuh sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN Program KOTAKU mendukung Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan pemukiman yang layak huni diantaranya adalah melalui peran badan keswadayaan masyarakat (BKM).

BKM merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif dari suatu himpunan masyarakat warga di tingkat desa dengan peran utama sebagai dewan pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif bersama masyarakat desa dan stakeholder desa. BKM pada prinsipnya adalah wadah sinergis masyarakat bagi orang-orang yang peduli terhadap permasalahan kemiskinan di komunitasnya. BKM dalam melaksanakan misi pemberdayaan masyarakat BKM menumbuh kembangkan kelompok-kelompok swadaya masyarakat sebagai media belajar untuk memecahkan masalah kemiskinan secara mandiri dan

partisipatif. Badan keswadayaan masyarakat ini memfasilitasi kebutuhan dari kelompok-kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang ada atau masyarakat miskin pada umumnya untuk dapat terus tumbuh dan berkembang untuk meningkatkan perekonomiannya.

BKM juga merupakan jembatan penghubung aspirasi masyarakat desa serta memperjuangkan warga di tingkat kelurahan atau desa dalam musbangdes. BKM juga sebagai peran utama dalam menjalankan sebuah program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk masyarakat keluarga penerima manfaat. Program KOTAKU merupakan program yang dilaksanakan secara nasional di 364 Kelurahan/Desa seluruh Indonesia yang menjadi basis penanganan pemukiman kumuh yang menggabungkan berbagai sumber daya manusia maupun sumber pendanaan termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, swasta masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satu wilayah sasaran KOTAKU adalah Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa Desa cimekar Kecamatan Cileunyi dikategorikan sebagai wilayah pemukiman kumuh karena kondisi rumah-rumah di desa ini ini belum sepenuhnya terlayani dengan fasilitas Pelayanan seperti jalan berlubang, tidak terpeliharanya drainase sistem pengelolaan sampah yang kurang baik sehingga banyak sampah yang berserakan di pinggir jalan yang mana menjadi saluran drainase. Selain itu sistem pengelolaan air limbah belum sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Kondisi ini dimana

pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau pemukiman tidak memiliki sistem yang memadai yang terhubung dengan tangki septik.

Desa cimekar Kecamatan Cileunyi merupakan salah satu wilayah yang menjadi fokus target program KOTAKU, alasan terpilihnya lokasi ini karena desa cimekar memiliki potensi sosial yang besar seperti gotong royong, kepedulian, musyawarah, keswadayaan dan lain-lain yang mana cukup baik untuk memperbaiki masalah infrastruktur pada lingkungan desa cimekar yang bertujuan untuk melancarkan akses ekonomi pendidikan dan lain-lain. BKM Mekar Sejahtera yang berada di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. setiap tahun menjadi sasaran penerima program dari pemerintah mulai dari program P2KP pada tahun 2000, PNPM Mandiri Perkotaan hingga saat ini dalam program KOTAKU yang dimulai pada tahun 2015 sampai sekarang. Program KOTAKU diharapkan menjadi platform kolaborasi yang mendukung penanganan pemukiman kumuh yang dilakukan secara bertahap melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat dasar di tingkat kota maupun desa serta pendamping teknis untuk mendukung tercapainya sasaran program.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program kotaku dan bagaimana upaya BKM dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Cimekar, yang mana partisipasi

masyarakat ini menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program KOTAKU. Selain sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan program kotaku juga merupakan pencerminan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat dalam wujud pembangunan juga lebih fokus perhatian pada aspek manusia dan lingkungan agar manusia bisa nyaman dengan lingkungan yang bersih dan layak huni.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam pernyataan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat Mekar Sejahtera (BKM-MS) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat?
2. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam merealisasikan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)?
3. Bagaimana bentuk keberhasilan partisipasi masyarakat dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang tertera maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realita mengenai;

1. Strategi yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat Mekar Sejahtera (BKM-MS) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

2. Bentuk partisipasi masyarakat dalam Merealisasikan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
3. Bentuk keberhasilan partisipasi masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan menjadi rujukan pengembangan ilmu Pengembangan Masyarakat Islam mengenai kajian partisipasi masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti yang dijabarkan berikut ini :

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta meningkatkan kompetensi keilmuan dalam disiplin ilmu yang digeluti khususnya pada ilmu Pengembangan Masyarakat Islam. Selain itu, sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian kesarjanaan pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam.

- b. Bagi Lembaga Perguruan Tinggi



Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memacu penelitian yang lebih baik mengenai partisipasi individu-sosial masyarakat.

c. Bagi Pembuat Kebijakan dan Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai manfaat dari partisipasi masyarakat dalam menanggapi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), sehingga timbul partisipasi aktif dalam mengembangkan masyarakat.

d. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dan dapat menjadi bahan referensi, khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah partisipasi masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat.

## **E. Landasan Pemikiran**

### **1. Hasil Penelitian Sebelumnya**

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Indah Fitrianiingsih mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam UIN Walisongo Semarang yang berjudul *Model Pengembangan Masyarakat Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Krajan Kulon, Kaliwungu Kendal*. Skripsi ini membahas tentang model pengembangan masyarakat dan pelaksanaan model pengembangan masyarakat melalui KOTAKU. Pada

tahap pelaksanaan menggunakan model perencanaan sosial. Sedangkan tahap pelaksanaan menggunakan model pengembangan aksi sosial yang menekankan pada tujuan, proses dan hasil melalui penyadaran, pemberdayaan melalui kegiatan pelatihan seperti pelatihan Kelompok Swadaya Masyarakat dan pelatihan relawan.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Afi Rafita mahasiswa program studi Perencanaan Wilayah Dan Kota Universitas Islam Bandung yang berjudul *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Sukapura*. Sistem penyediaan air bersih merupakan syarat mendasar peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh perkotaan. Pemerintah membentuk program kota tanpa kumuh (KOTAKU) untuk mencegah dan meningkatkan kualitas pemukiman kumuh di perkotaan melalui pembangunan infrastruktur dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, partisipasi masyarakat Dalam pengembangan sistem penyediaan air bersih melalui program KOTAKU di Kelurahan Sukapura diindikasikan bahwa setiap tahapnya disusun dan dilakukan oleh pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu. Selain itu masyarakat belum dapat dikatakan Mandiri dalam pelaksanaannya dan memiliki rasa enggan dari masyarakat untuk mengikuti program tersebut.

Penelitian ini menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan sistem penyediaan air bersih melalui program kotaku di

Kelurahan Sukapura berada pada tingkat partisipasi konsultatif artinya masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi sedangkan masyarakat belum memiliki peluang untuk membuat keputusan bersama walaupun masyarakat antusias masyarakat perlu didampingi oleh tim fasilitator karena pengetahuan masyarakat mengenai pembangunan fisik yang dilakukan masih kurang. Masyarakat masih perlu didampingi oleh pihak program melalui tim fasilitator mengenai perencanaan pelaksanaan, pemanfaatan, pengelolaan hingga pengawasan pada pembangunan fisik yang dilakukan.

*Ketiga*, Penelitian ini dilakukan oleh Istiqomah Solehatun Nisa mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung dengan judul penelitian *Implementasi Program (KOTAKU) Kota Tanpa Kumuh Di Kelurahan Sawah Lama Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung*. program kotakku di Kelurahan sawah lama berdasarkan isi kebijakan dan lingkungan implementasi implementasi itu program kotakku bertujuan untuk mengurangi pemukiman kumuh dan mencegah timbulnya pemukiman kumuh baru, pada indikator ini persentasi berhasilnya adalah sebesar 85% karena dilihat dari dana yang diberikan pemerintah sudah diberikan serta digunakan dengan baik. hal itu dapat dilihat dari sudah Tersedianya angkutan sampah, infrastruktur jalan yang sudah paving block, maupun pembuatan drainase dan resapan air. namun adanya kekuasaan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat justru dapat menghambat pengimplementasian program kotakku karena

masih terdapat oknum yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Selain itu kurangnya partisipasi masyarakat dalam program ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat, kesibukan masyarakat, kurangnya kepercayaan masyarakat tentang penyelenggaraan program kotaku, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembangunan. Oleh karena itu program kotaku sebaiknya sosialisasi dan pendekatan lebih lanjut mengenai program KOTAKU kepada semua masyarakat Kelurahan Sawah lama agar partisipasi masyarakat terhadap pentingnya daerah bebas kumuh lebih meningkat dari sebelumnya.

Dari penelitian-penelitian di atas terdapat kesamaan pada penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang program (KOTAKU) Kota Tanpa Kumuh, akan tetapi peneliti tentang partisipasi masyarakat pada program KOTAKU masih layak diteliti karena sejauh penelusuran penulis belum ditemukan penelitian program KOTAKU di wilayah Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Penelitian ini akan membahas tentang partisipasi masyarakat pada program kotaku serta mendeskripsikan strategi BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Beserta bentuk dari keberhasilan program KOTAKU Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

## 2. Landasan Teoritis

Untuk memudahkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi, maka secara ilmiah diperlukan landasan teori sebagai bahan dalam memecahkan

suatu permasalahan menurut para ahli dibidangnya. Oleh karena itu peneliti memaparkan beberapa pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.

Permukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang mana kualitasnya sangat tidak layak huni, ciri-cirinya antara lain tergantung pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya/tata ruang. Pengembangan pembangunan yang sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan keselamatan keberlangsungan hidup dan penghidupan penghuninya (Budiharjo, 1997). Sedangkan menurut pendapat lain mengatakan bahwa pemukiman kumuh yang sering dilihat sebagai suatu kawasan yang identik dengan kawasan yang apatis, kelebihan penduduk, tidak mencukupi, tidak memadai, miskin, di bawah standar, tidak sehat dan masih banyak lagi stigma negatif lainnya (rahardjo, 2010).

Program KOTAKU menjadi salah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100” yang artinya 100% akses universal air minum, 0% permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi layak. Arah kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas).

Program KOTAKU menangani wilayah kumuh dengan membangun *platform* kolaborasi melalui peningkatan pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakat. Tahapan pelaksanaan program KOTAKU adalah tahap perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, BKM/LKM untuk pendataan kondisi awal yang nantinya akan diintegrasikan antara dokumen perencanaan masyarakat dengan dokumen perencanaan kabupaten/kota untuk menentukan kegiatan prioritas, tahap pelaksanaan yang dijalankan oleh masyarakat desa dan pihak lain yang berkepentingan, dan tahap monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, BKM/LKM dan masyarakat desa.

Program KOTAKU akan mencapai tujuannya yaitu 100% air minum, 0% kumuh dan 100% sanitasi layak jika adanya partisipasi dari masyarakat. Karna masyarakat yang akan menjalankan programnya dan masyarakat juga yang akan menerima manfaatnya. Partisipasi menurut Cohen dan Uphoff dalam Astuti D (2011: 61-63) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, antaranya:

1. Partisipasi pada pengambilan keputusan, berkaitan dengan menentukan alternatif dengan masyarakat yang berkaitan yaitu melalui ide atau gagasan yang menyangkut kepentingan umum. Wujud dalam partisipasi ini adalah dengan menyumbangkan gagasan pemikiran, melalui kehadiran saat rapat, memberikan tanggapan atau penolakan.

2. Partisipasi pada pelaksanaan, meliputi upaya menggerakkan sumber daya keuangan, kegiatan-kegiatan administratif, koordinasi dan penjabaran program.
3. Partisipasi pada pengambilan manfaat, dalam tahap ini tidak lepas dari tahap pelaksanaan yang telah dicapai baik dari sisi kualitas (output kegiatan) maupun kuantitas (dilihat dari presentase keberhasilan program).
4. Partisipasi pada evaluasi, berkenaan dengan program yang sudah direncanakan. Partisipasi memiliki tujuan untuk mengetahui sejauhmana ketercapaian suatu program yang telah direncanakan sebelumnya.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *peoplecentered*, *participatory*, *empowerment and sustainable* (Chamber, 1995). Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab "*syakara*" yang berarti ikut serta, berpartisipasi atau "*musyaraka*" yang berarti bergaul. Di dalam bahasa inggris dipakai istilah "society" yang sebelumnya berasal dari bahasa latin "*socius*" yang berarti kawan. Definisi masyarakat adalah golongan yang besar atau kecil yang terdiri atas beberapa manusia yang dengan sendirinya saling mempengaruhi satu sama lain (koentjaraningrat, 2009)

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program artinya bagaiman cara untuk mewujudkan tujuan secara bersama-

sama. Diperlukan beberapa strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Arti kata dari strategi menurut KBBI adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi merupakan rencana berskala besar dengan orientasi masa depan guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan (Pearce II, 2008). Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Kristianto (2010) dalam penelitiannya berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan menjelaskan strategi partisipasi masyarakat, diantaranya:

1. Meningkatkan kinerja fasilitator.
2. Pemerintah harus memberikan dana-dana stimulus pembangunan.
3. Pemerintah harus terbuka dan menerima aspirasi masyarakat.
4. Melibatkan masyarakat dalam pembangunan.

Dari strategi-strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang telah dipaparkan dapat dilihat indikator-indikator keberhasilannya. Indikator merupakan variabel-variabel yang dapat menunjukkan atau mengidentifikasi kepada penggunaannya mengenai kondisi tertentu sehingga dapat dipakai untuk mengukur suatu kondisi tertentu sehingga dapat dipakai untuk mengukur suatu perubahan yang terjadi (Green, 1992). Keberhasilan merupakan suatu pencapaian, dimanapun pencapaian yang dimaksud sesuai dengan tujuan atau apa yang direncanakan (Halmet, 2012). Dalam artian indikator keberhasilan merupakan variabel-variabel untuk melihat atau mengidentifikasi hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan atau yang telah direncanakan. Dari keberlanjutan



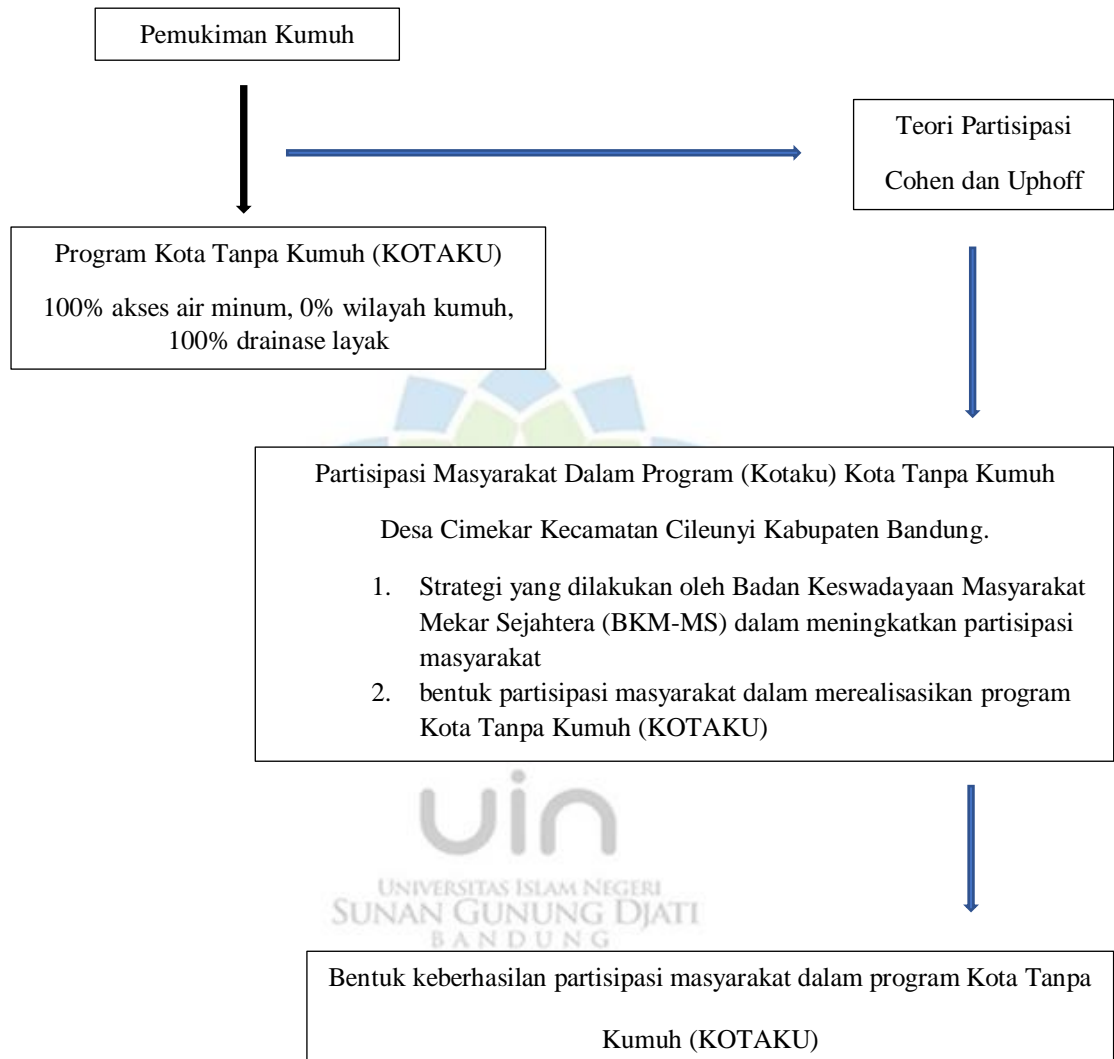
program atau kegiatan yang telah dilaksanakanpun dapat dilihat indikatornya jika program atau kegiatan yang telah direncanakan, dilaksanakan, dimonitoring evaluasi dan terus berlanjut (sustainable) itu artinya program yang laksanakan berhasil dan sesuai kebutuhan masyarakat juga sebagai bentuk dari aktifnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan khususnya dalam program pembangunan desa.

Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan sangat ditentukan oleh tiga unsur (Slamet, 2010), yaitu:

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi.
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi.
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.



### 3. Kerangka konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini meliputi wilayah kumuh, program KOTAKU dan konsep partisipasi. Pemukiman kumuh merupakan awal dari permasalahan yang menjadi bahan yang diteliti oleh peneliti, Pemukiman kumuh adalah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi disebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Pengembangan pembangunan yang sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan

penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan keselamatan keberlangsungan hidup dan penghidupan penghuninya (Budiharjo, 1997). Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program percepatan penanggulangan wilayah kumuh oleh Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Program KOTAKU dilaksanakan di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sebagai implementasi percepatan penanggulangan kumuh, program KOTAKU melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya pemukiman kumuh baru. Dengan kegiatan meliputi pembangunan infrastruktur, pendampingan sosial dan ekonomi. 100%,0%,100% merupakan tujuan akhir dari Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Prumahan Rakyat yang maksudnya adalah 100% akses universal air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di pemukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya lingkungan yang layak huni, produktif dan keberlanjutan. Dan hal tersebut mengandung dua maksud, pertama, memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan, kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dipermukiman kumuh berbasis masyarakat dan partisipasi pemerintah desa.

Untuk mencapai tujuan dari program KOTAKU untuk menanggulangi pemukiman kumuh dibutuhkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari perubahan yang telah direncanakan bersama-sama secara partisipatif sesuai kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang akan menjalankan program/ kegiatan dan masyarakat pula yang akan menikmati manfaatnya. Teori partisipasi yang peneliti gunakan adalah partisipasi menurut Cohen dan Uphoff dalam Astuti D (2011: 61-63) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, antaranya:

1. Partisipasi pada perencanaan
2. Partisipasi pada pelaksanaan
3. Partisipasi pada pengambilan manfaat
4. Partisipasi pada evaluasi

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kantor Desa Cimekar, kantor Badan Keswadayaan Masyarakat Mekar Sejahtera (BKM-MS) dan masyarakat Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

### **2. Paradigma dan Pendekatan**

Paradigma adalah model ilmu pengetahuan atau kerangka berpikir, atau pandangan mendasar para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Menurut KBBI pendekatan adalah proses perbuatan, cara mendekati atau usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang

diteliti, metode-metode untuk mencapai pengertian tentang penelitian masalah.

### 3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskriptif, gambaran mengenai fakta-fakta. Digunakannya metode ini adalah berdasarkan pengalaman peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami dibalik fenomena atau kejadian yang ada dilapangan. Penelitian ini dengan judul penelitian yang terfokuskan pada partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU, maka penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai partisipasi masyarakat. Metode deskriptif merupakan cara untuk menggambarkan gejala, peristiwa, dan kejadian-kejadian yang terjadi ditempat penelitian. Dengan metode ini peneliti dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan tanpa ada kecurangan apapun termasuk menipulasi data (Nasrulloh, 2018).

### 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data berupa hasil pengamatan dan pencatatan peneliti atas fakta-fakta dan gejala yang terjadi dilapangan, yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat. Data tersebut berupa data yang berkaitan dengan masalah penelitian yakni mengenai partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU. Jenis data terbagi menjadi dua yakni; data primer yang merupakan segala informasi terkait dengan Badan Keswadayaan Masyarakat Mekar Sejahtera dalam

meningkatkan partisipasi masyarakat yang bersumber dari ketua BKM Mekar Sejahtera, anggota BKM Mekar Sejahtera, Kepala Desa Cimekar, dan perwakilan masyarakat Desa Cimekar. Serta data sekunder yang berkaitan dengan segala informasi mengenai permasalahan penelitian dari sumber lain baik pemikiran, karya maupun dokumentasi.

## 5. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh dari sumber data utama, dan secara langsung. Bisa berbentuk hasil wawancara atau pendapat orang lain. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang berada dilapangan untuk mendapatkan data primer. Salah satu kelebihan data primer yaitu menggambarkan keaslian apa yang dilihat informan yang akan diteliti nantinya, diantaranya:

1. Badan Keswadayaan Masyarakat Desa Cimekar dua orang.
2. Aparatur Pemerintahan Desa Cimekar satu orang.
3. Masyarakat Desa Cimekar satu orang.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua dari sumber data yang ada. Data sekunder dapat dibidang sebagai data pelengkap yang didapat dari hasil studi pustaka. Data ini diperoleh dari sejarah dan profil objek penelitian yaitu Desa Cimekar, BKM Mekar Sejahtera dan pedoman umum program KOTAKU. Tidak sebatas sejarah dan profil, data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku referensi terkait dengan partisipasi

masyarakat dan program KOTAKU, juga arsip lain yang dijadikan sebagai pelengkap data.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara paling mudah untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian, langkah ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data-data yang dirasa perlu. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti ini dengan langsung kelapangan, dengan demikian peneliti dapat merasakan dan menemukan kondisi dan data yang ada dilapangan. Teknik yang digunakan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi :

### a. Observasi

Observasi merupakan penelitian mendalam yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan. Peneliti bisa melihat, merasakan juga mempelajari kondisi masyarakat tentang perilaku sosialnya, masalah-masalah sosial, fenomena sosial dan peneliti pun dapat memaknai hasil dari observasinya setelah turun kelapangan.

Berbeda dengan teknik pengumpulan data lainnya, observasi tidak fokus pada informan saja, melainkan teknik ini lebih mengedepankan hasil penglihatan secara langsung kepada kondisi masyarakat Desa Cimekar. Peneliti melibatkan diri kepada masyarakat dan sesekali peneliti juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada warga setempat untuk membantu memperjelas pengamatan dan mendapatkan informasi yang sesuai dengan

keadaan yang sebenarnya. Dengan teknik ini peneliti akan mendapatkan keaslian data secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antar individu dengan individu yang saling bertukar pengetahuan. Mereka melakukan tanya jawab dan mendapatkan informasi. Informasi tersebut kurang lebih seputar apa yang ingin mereka ketahui. Informan akan menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti seputar informasi apa yang ingin peneliti ketahui (Sugiyono, 2009).

Dalam proses ini, peneliti selaku pewawancara melakukan wawancara kepada Aparatur Desa Cimekar yaitu kepala Desa Cimekar (Iwan Dharmawan), BKM Mekar Sejahtera yaitu ketua BKM (Asep Taruna), bidang sosial BKM-MS (Hayati), dan perwakilan masyarakat yang bergabung sebagai anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) (Entin, Nano, dan Ana) selaku informan atau narasumber, dengan mengajukan 10 pertanyaan kepada kepala Desa Cimekar, 48 pertanyaan kepada ketua BKM dan bidang sosial BKM-MS, dan 17 pertanyaan kepada masyarakat Desa Cimekar untuk meminta keterangan dan kejelasan terkait masalah penelitian.

c. Studi Dokumentasi

Proses pengumpulan data dalam hal ini adalah dilakukan dengan pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen baik berupa buku mengenai partisipasi masyarakat dan program KOTAKU, arsip



berupa rekaman kegiatan di BKM Mekar Sejahtera , jurnal-jurnal mengenai partisipasi masyarakat dan program KOTAKU, laporan penelitian sebelumnya terkait program KOTAKU dan majalah mengenai kegiatan sosial Desa Cimekar dan BKM Mekar Sejahtera. Sehingga menjadikan dokumen tersebut sebagai bahan perbandingan atas realita data dan informasi yang telah dihasilkan dari penelitian.

d. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Dalam keabsahan data ini, dilakukan proses triangulasi. Menurut William Wiersma dalam Sugiono (2007: 372), untuk pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu, sehingga triangulasi dapat dikelompokkan dalam 3 jenis yakni: triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data dan triangulasi waktu. Dari tiga jenis triangulasi tersebut, penulis memilih keabsahan data dengan pendekatan triangulasi sumber untuk mengungkap dan menganalisis masalah-masalah yang dijadikan objek peneliti. Dengan demikian analisis data penelitian ini menggunakan metode *triangulasi observers*.

7. Pengelolaan Dan Analisis Data

Analisi data merupakan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Dalam hal ini peneliti menganalisis data dengan menggunakan analisis berdasarkan jenis data kualitatif, menurut Emzir (2012: 129-133) langkah-langkah dalam proses menganalisis data sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi serta membandingkan dan menelaah untuk memperoleh kebenaran dari tiap-tiap sumber.

b. Reduksi Data

Reduksi data menunjukkan pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Pada penelitian ini reduksi data dilakukan setelah observasi dilakukan, karena dari observasi kita bisa mendapatkan gambaran (data mentah) setelah itu baru pemokusan penyederhanaan data dilakukan dengan memfokuskan pada rumusan dan tujuan yang akan dicapai peneliti.

c. Dikategorisasi

Data yang sudah difokuskan disusun dalam satuan-satuan data yang dihasilkan dalam proses pengumpulan data untuk mengkategorisasikan. Pada penelitian ini data yang sudah dikategorisasikan adalah peran partisipasi, strategi yang dilakukan dan faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat.

d. Pengambilan Kesimpulan

Langkah terakhir dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Setelah data terkumpul secara lengkap maka dilakukan penarikan kesimpulan atas data yang terkumpul agar memudahkan dalam penguasaan data.